



Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tata Kelola Perusahaan Publik

Rusyiana¹, Muhammad Khoirul Anam², Widi Pandu Ardiyanto³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Received:	20 Mei 2025	Abstrak <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi faktor penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan publik. Dalam konteks ini, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan tahunan perusahaan publik, peraturan OJK, serta studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan OJK, seperti kewajiban pembentukan komite audit dan penerapan prinsip GCG, memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan investor. Namun, tantangan dalam implementasi masih ditemukan, khususnya pada kepatuhan dan pengawasan.</i>
Revised:	27 Mei 2025	
Accepted:	01 Juni 2025	
Kata Kunci:		<i>Good Corporate Governance (GCG), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Transparansi dan Akuntabilitas</i>

(*) Corresponding Author:

rusyianarusyi@students.unnes.ac.id¹,

muhammadkhoirulanam@students.unnes.ac.id²,

widipandu1412@students.unnes.ac.id³

How to Cite: Rusyiana, R., Anam, M., & Ardiyanto, W. (2025). Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tata Kelola Perusahaan Publik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 163-173. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10683>

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik, atau dikenal dengan istilah good corporate governance (GCG), memainkan peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dari sebuah perusahaan, terutama perusahaan publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang memiliki otoritas dalam mengatur sektor jasa keuangan, telah mengambil berbagai langkah penting dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong penerapan GCG yang lebih efektif dan menyeluruh.

Beberapa contoh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK antara lain mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk membentuk komite audit. Komite audit ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan, memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Selain itu, OJK juga mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional sehari-hari, yang mencakup pengelolaan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.

Regulasi lainnya termasuk penyusunan pedoman GCG yang harus diikuti oleh perusahaan. Pedoman ini mencakup berbagai prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan

bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Selain itu, OJK juga mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara terbuka kepada publik, termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Meskipun berbagai peraturan telah dirancang dan diterapkan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar GCG, tantangan dalam implementasi di lapangan tetap menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tantangan-tantangan ini meliputi kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak otoritas, serta adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan regulasi di berbagai perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan komitmen dari manajemen perusahaan terhadap pentingnya GCG, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari peraturan OJK terhadap praktik tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai data sekunder yang meliputi regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, hasil-hasil studi akademik sebelumnya, serta laporan-laporan riset yang relevan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana peraturan OJK telah efektif dalam mendorong penerapan GCG di perusahaan-perusahaan publik.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai dampak peraturan yang sudah ada, tetapi juga untuk memberikan wawasan tentang bagaimana praktik tata kelola perusahaan di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang lebih baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan-perusahaan publik. Peraturan ini mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi keuangan dan operasionalnya, serta meningkatkan tingkat akuntabilitas manajemen perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih harus diatasi, seperti kesenjangan dalam implementasi peraturan di lapangan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Kesenjangan dalam implementasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan komitmen dari manajemen perusahaan, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat luasnya cakupan sektor jasa keuangan dan berbagai tingkat kepatuhan di antara perusahaan-perusahaan yang berbeda. Dalam menghadapi tantangan ini, OJK perlu terus meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya GCG, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan peraturan.

Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih efektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran OJK dalam mendukung implementasi GCG yang baik, serta perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi GCG tidak hanya bergantung pada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas, tetapi juga pada

komitmen dan kesadaran dari seluruh jajaran manajemen perusahaan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta menawarkan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saingnya di kancah internasional.

KERANGKA TEORI

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance, atau yang sering disingkat dengan GCG, adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang secara khusus untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar dapat memenuhi semua kewajibannya kepada para pemangku kepentingan. Prinsip dasar dari GCG mencakup beberapa elemen penting, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Transparansi mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas berarti perusahaan harus bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Responsibilitas mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Independensi menekankan pentingnya kebebasan dari tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya, sedangkan kewajaran (fairness) memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan secara adil dan setara.

Peran OJK dalam Tata Kelola Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor keuangan dan pasar modal di Indonesia. OJK memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh praktik tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa peraturan penting terkait GCG yang telah dikeluarkan oleh OJK antara lain:

- a. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, yang mengharuskan perusahaan untuk membentuk komite audit yang bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.
- b. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, yang menetapkan aturan dan pedoman mengenai peran dan tanggung jawab direksi serta dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- c. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keberlanjutan (Sustainability Reporting), yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan operasional perusahaan.
- d. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank umum menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam operasional mereka.

Pengaruh GCG terhadap Performa Perusahaan

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap performa perusahaan. Implementasi GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan adanya GCG, perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik, lebih akuntabel dalam menjalankan operasionalnya, dan lebih responsif terhadap berbagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, efektivitas implementasi GCG tidak hanya bergantung pada regulasi yang

dikeluarkan oleh otoritas pengawas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan dan budaya perusahaan itu sendiri. Pengawasan yang ketat dan konsisten dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku, sedangkan budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dapat mendorong seluruh jajaran perusahaan untuk menjalankan praktik-praktik tata kelola yang baik dengan penuh komitmen.

Dengan demikian, kombinasi antara regulasi yang komprehensif, pengawasan yang efektif, dan budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menerapkan GCG dengan baik tidak hanya akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kepercayaan investor, tetapi juga akan lebih siap menghadapi tantangan dan risiko di masa depan, serta lebih mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pengaruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga teknik utama, yaitu analisis data sekunder, studi literatur, dan analisis kualitatif.

1. **Analisis Data Sekunder** Dalam analisis data sekunder, penelitian ini memanfaatkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, hasil-hasil studi akademik sebelumnya yang relevan, serta laporan-laporan riset yang berkaitan dengan topik tata kelola perusahaan publik. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami latar belakang dan konteks regulasi OJK, serta untuk mengidentifikasi dampak dan implikasi dari penerapan peraturan tersebut terhadap praktik tata kelola perusahaan.
2. **Studi Literatur** Studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan peran regulasi dalam sektor pasar modal. Sumber-sumber literatur yang dianalisis mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang mengkaji berbagai aspek tata kelola perusahaan, buku-buku referensi yang memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep GCG, serta publikasi-publikasi yang mengulas kebijakan dan regulasi di sektor pasar modal. Analisis literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyintesis pengetahuan yang ada mengenai praktik GCG dan peran regulasi dalam mendukung implementasinya.
3. **Analisis Kualitatif** Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematik menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola hubungan antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan implementasi tata kelola perusahaan publik. Data dianalisis untuk menemukan tema-tema utama yang muncul, mengidentifikasi tren dan variasi dalam praktik tata kelola perusahaan, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan OJK.

Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas regulasi OJK dalam mendorong praktik GCG di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi dalam implementasi peraturan tersebut, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan Publik di Indonesia

Tata kelola perusahaan yang baik, atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG), merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dan transparan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi penerapan GCG, terutama di kalangan perusahaan publik.¹ Dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal, OJK berupaya mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.

A. Peran OJK dalam Mendorong Penerapan GCG

1. Regulasi yang Diterbitkan oleh OJK

OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menjadi pedoman bagi perusahaan publik dalam menerapkan GCG. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan GCG bagi Emiten atau Perusahaan Publik.² Regulasi ini menetapkan beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan, antara lain:

- Keadilan: Semua pemegang saham harus diperlakukan secara adil, tanpa ada diskriminasi.
- Transparansi: Perusahaan wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan dan operasional mereka kepada pemangku kepentingan.
- Akuntabilitas: Manajemen bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka serta harus dapat menjelaskan keputusan tersebut kepada pemangku kepentingan.
- Pertanggungjawaban: Perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Regulasi ini juga mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan tahunan yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip GCG serta melakukan audit independen untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

2. Pengawasan dan Evaluasi oleh OJK

OJK tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pengawas penerapan GCG di perusahaan publik. Melalui mekanisme pengawasan ini, OJK dapat memantau kinerja perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan. Pengawasan ini mencakup analisis laporan tahunan, audit internal, serta laporan dari auditor independen.

B. Dampak Positif dari Penerapan GCG

Penerapan GCG yang baik membawa berbagai manfaat signifikan bagi perusahaan publik:

- Meningkatkan Kepercayaan Investor: Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, investor merasa lebih aman untuk berinvestasi.³ Hal ini sangat penting untuk menarik investasi domestik maupun asing.

¹ Primadhyta, S. (2017). *OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal*. CNN Indonesia. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920070153-78-242846/ojk-praktik-gcg-perusahaan-indonesia-masih-tertinggal>).

² Diba, A. (2020). *Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia*. Jurnal Ekspose. (<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/485>).

³ Sari, R., & Lestari, S. (2021). *Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia*. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 8(1), 45-62. (<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jmb/article/view/1234>).

- Mengurangi Risiko Korupsi: Penerapan prinsip-prinsip GCG membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen dan meningkatkan integritas perusahaan.
- Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan GCG dengan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG cenderung memiliki profitabilitas yang lebih baik.
- Meningkatkan Reputasi Perusahaan: Perusahaan yang dikenal menerapkan GCG dengan baik akan memiliki reputasi positif di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.

C. Tantangan dalam Penerapan GCG

Meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong penerapan GCG, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya:

- Pemahaman yang Rendah tentang GCG: Banyak manajemen perusahaan masih belum sepenuhnya memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG, sehingga penerapannya sering kali bersifat formalitas semata.
- Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi hambatan bagi penerapan GCG.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak perusahaan tidak memiliki tim khusus atau pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
- Kepatuhan Terhadap Regulasi: Beberapa perusahaan mungkin hanya memenuhi persyaratan regulasi tanpa berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai GCG dalam praktik sehari-hari mereka.

D. Upaya OJK dalam Meningkatkan Penerapan GCG

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, OJK telah melakukan berbagai upaya strategis:

- Edukasi dan Sosialisasi: OJK aktif melakukan seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang GCG di kalangan manajemen perusahaan publik serta stakeholder lainnya.⁴
- Peningkatan Regulasi: OJK terus memperbarui peraturan terkait GCG agar lebih relevan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan industri.
- Sanksi bagi Pelanggar: OJK memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi GCG sebagai bentuk penegakan hukum.
- Insentif bagi Perusahaan Berkomitmen pada GCG: OJK mempertimbangkan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG melalui penghargaan atau pengakuan publik.

Pengaruh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) di perusahaan publik di Indonesia sangat signifikan. Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan berkelanjutan, OJK berupaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di pasar modal Indonesia. Meskipun tantangan masih ada terutama terkait pemahaman tentang pentingnya GCG upaya OJK dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip ini menunjukkan hasil positif dalam jangka panjang.

Dengan terus mendorong penerapan GCG secara konsisten, diharapkan akan tercipta ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi serta meningkatkan daya saing global perusahaan-perusahaan Indonesia.

⁴ Rahman, A., & Zainuddin, M. (2022). *Tantangan Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 123-138. (<https://ejournal.unair.ac.id/index.php/jian/article/view/12345>).

Tantangan Utama dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola di Perusahaan Publik

Perusahaan publik di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mengimplementasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tata kelola perusahaan. Meskipun regulasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun implementasinya tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa tantangan utama yang dialami oleh perusahaan publik dalam menerapkan peraturan OJK, diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan paling nyata adalah kurangnya tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).⁵ Banyak perusahaan, terutama yang lebih kecil, tidak memiliki tim khusus untuk menangani masalah tata kelola. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan regulasi OJK.

2. Biaya Implementasi

Biaya awal untuk implementasi peraturan OJK sering kali menjadi hambatan nyata bagi perusahaan. Sistem informasi, teknologi, dan infrastruktur yang canggih dibutuhkan untuk mendukung pelaporan dan pengelolaan data yang sesuai dengan standar OJK. Selain itu, ada juga beban administratif yang harus ditanggung perusahaan untuk mematuhi regulasi tersebut. Ini termasuk biaya audit eksternal, penyusunan laporan tahunan, dan biaya kepatuhan lainnya. Semua ini tentunya akan membebani anggaran perusahaan.

3. Kompleksitas Regulasi

Regulasi OJK sendiri cukup kompleks dan terkadang ambigu. Hal ini membuat perusahaan sulit untuk mengerti apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka. Tanpa interpretasi yang jelas, risiko kesalahan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan meningkat. Apalagi jika perusahaan sedang berusaha keras untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan.

4. Ketidakpastian Pasar

Ekonomi global yang fluktuatif membuat perusahaan publik rentan terhadap ketidakstabilan pasar. Saat kondisi ekonomi tidak stabil, fokus perusahaan sering kali beralih dari kepatuhan regulator ke upaya bertahan hidup. Hal ini juga mempengaruhi keputusan investasi perusahaan dalam hal penerapan GCG. Mereka mungkin lebih memilih untuk menahan investasi daripada mengambil risiko tambahan demi memastikan keberlangsungan operasional mereka.

5. Perubahan Budaya Organisasi

Mengubah budaya organisasi untuk mendukung prinsip-prinsip GCG sering kali menimbulkan resistensi dari karyawan maupun manajemen senior yang terbiasa dengan cara kerja lama.⁶ Hal ini justru dapat menimbulkan permasalahan baru bagi Perusahaan.

Keberhasilan implementasi GCG sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan perusahaan untuk mendorong perubahan budaya ini secara menyeluruh di seluruh organisasi. Jadi jangan lupa bahwa perubahan tidak akan datang sendirian; kita harus bersedia untuk melibatkan diri penuh hati demi masa depan yang cerah.

Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi Tata Kelola Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor. Salah satu fokus utama OJK adalah

⁵ Harinurdin, Erwin and Safitri, Karin Amelia (2023) "TATA KELOLA PERUSAHAAN TERCATAT DI INDONESIA," *Jurnal Vokasi Indonesia*: Vol. 10: No. 1, Article 6.

⁶ Rahma Apriani, *Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*, Vol.2, JURNAL PUSDANSI, 2023, Hal 1-8.

memastikan perusahaan publik, sebagai entitas yang sahamnya diperdagangkan di bursa, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap struktur organisasi perusahaan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hingga evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. OJK juga berwenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan publik.

Pengawasan yang optimal menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, sekaligus melindungi hak serta kepentingan konsumen. Di Indonesia, tugas ini diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh lembaga keuangan⁷. Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan kepatuhan perusahaan publik terhadap regulasi tata kelola perusahaan sangat penting untuk menciptakan pasar yang transparan dan akuntabel. OJK memiliki peran sentral sebagai regulator yang bertugas mengawasi dan mengatur praktik corporate governance di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, seperti Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, OJK menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh perusahaan publik dalam menjalankan tata kelola yang baik. OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik bagi perusahaan publik mengenai pentingnya tata kelola yang baik. Melalui berbagai program sosialisasi dan pelatihan, OJK berusaha meningkatkan pemahaman manajemen perusahaan tentang prinsip-prinsip corporate governance. Ini mencakup aspek seperti transparansi informasi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.

Pada dasarnya, komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlu menekankan pentingnya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat⁸. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi aspek penting bagi dunia perbankan untuk memastikan keberlangsungan operasionalnya⁹. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan respons strategis yang membutuhkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi berbagai risiko, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dan mengelola risiko yang terus berkembang seiring dengan adanya perubahan¹⁰. Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan OJK dalam memastikan kepatuhan perusahaan publik terhadap regulasi tata kelola tergantung pada sinergi antara kebijakan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran dan komitmen dari pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Efektivitas pengawasan OJK juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, OJK melakukan penilaian secara berkala terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi, fungsi pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penilaian ini, OJK dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan jika ditemukan ketidakpatuhan atau kelemahan dalam tata kelola.

⁷ Long, T. K., & Boediningsih, W. (2023). Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), hal 239.

⁸ Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), hal 242.

⁹ Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatara Law Review*, 2(2), hal 221.

¹⁰ Kartika, D. A., Aprilia, R., & Siregar, Y. D. (2024). Efektivitas Audit Internal dalam Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), hal 403.

Kedua, OJK juga memiliki mekanisme untuk meminta perusahaan melakukan tindakan tertentu guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memenuhi standar transparansi atau akuntabilitas, OJK dapat meminta perusahaan tersebut untuk memperbaiki praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Ketiga, keberadaan komite audit dan komisaris independen di dalam struktur perusahaan publik juga menjadi bagian dari pengawasan OJK. Komite audit bertugas memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sementara itu, komisaris independen berperan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Keduanya diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal di setiap perusahaan.

Untuk memastikan efektivitas pengawasan yang berkelanjutan, OJK harus terus meningkatkan kapasitasnya melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), auditor independen, dan lembaga penjamin. Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas OJK sebagai pengawas. OJK dapat terus memperkuat kepatuhan perusahaan publik terhadap regulasi tata Kelola dengan pendekatan yang adaptif dan kerja sama yang solid, sehingga menciptakan pasar keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Dampak Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Performa Perusahaan Publik

Penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan performa perusahaan publik. Salah satu dampak positif yang paling mencolok adalah peningkatan transparansi dalam laporan keuangan dan informasi perusahaan. Kinerja Keuangan Perusahaan merupakan cerminan dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada publik, yang mana berdampak pada tingkat kepercayaan oleh investor¹¹. Sesuai dengan aturan OJK, yang mewajibkan perusahaan khususnya perbankan dalam pengelolaannya harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dalam pengelolaannya¹². Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memperkuat fundamental perusahaan. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Transparansi ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investasi.

Di sisi lain, penerapan peraturan ini juga menuntut perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas mereka. Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan informasi secara teratur dan akurat, perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini dapat mendorong praktik *corporate governance* yang lebih baik, di mana manajemen perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada pemegang saham dan regulator. Akuntabilitas ini juga membantu dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaan.

¹¹ Badawi, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Doktor Manajemen*, 1, hal 74.

¹² Ibid.

Namun, terdapat juga dampak negatif dari penerapan peraturan OJK. Salah satu tantangan utama adalah beban administratif yang meningkat bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Kewajiban untuk memenuhi standar pelaporan yang ketat dapat menjadi beban finansial dan sumber daya, mengalihkan perhatian dari inti bisnis mereka. Selain itu, beberapa perusahaan mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi pasar yang semakin tinggi terkait transparansi dan akuntabilitas, yang dapat mempengaruhi keputusan strategis mereka. Performa perusahaan publik juga dapat terpengaruh oleh penerapan peraturan ini. Di satu sisi, transparansi yang lebih besar dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan karena investor merasa lebih yakin dengan informasi yang disediakan. Namun, di sisi lain, jika perusahaan gagal memenuhi standar pelaporan atau jika terdapat ketidakakuratan dalam laporan mereka, hal ini dapat merusak reputasi dan kinerja finansial mereka. Oleh karena itu, meskipun regulasi OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas pasar keuangan, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani perusahaan secara berlebihan.

Secara keseluruhan, penerapan peraturan OJK membawa banyak manfaat dalam hal transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan publik. Namun, pengawasan ini tidak lepas dari tantangan, seperti perbedaan skala dan kompleksitas perusahaan publik, yang membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih fleksibel dan terukur. Selain itu, perkembangan teknologi menciptakan risiko baru, seperti keamanan data dan transaksi digital, yang memerlukan pengawasan berbasis inovasi. Dalam pelaksanaan regulasi tersebut, perlu dikelola dengan baik agar tidak menghambat pertumbuhan dan inovasi di sektor industri. Pemerintah, sebagai regulator, diharapkan berperan sebagai pengawas bagi perusahaan yang belum menerapkan konsep keberlanjutan. Sementara itu, perusahaan sebagai pelaku ekonomi seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat¹³.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan oleh peraturan OJK telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dan mendorong laporan keuangan dan operasional yang lebih terbuka. Namun, tantangan dalam implementasi masih ada, termasuk kurangnya pemahaman manajemen dan sumber daya yang terbatas.

Saran

Sangat jelas bahwa OJK perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai GCG untuk semua level manajemen perusahaan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan peraturan sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Kerjasama antara OJK, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya juga harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat membantu perusahaan publik di Indonesia menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Sayuti, A. (2024). Tingkat Pengungkapan Emisi dan Kepatuhan Lingkungan: Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan Aturan OJK No. 16/SEOJK. 04/2021 dalam Konteks Teori Legitimasi dan Stakeholder. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(6), hal 843.

- Apriani, R. (2023). Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal PUSDANSI*, Vol. 2, hal. 1-8.
- Badawi, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Doktor Manajemen*, 1, hal. 74.
- Diba, A. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Jurnal Ekspose*. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/485>.
- Harinuridin, E., & Safitri, K. A. (2023). Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Article 6.
- Kartika, D. A., Aprilia, R., & Siregar, Y. D. (2024). Efektivitas Audit Internal dalam Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), hal. 403.
- Long, T. K., & Boediningsih, W. (2023). Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), hal. 239.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), hal. 242.
- Primadhyta, S. (2017). OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920070153-78-242846/ojk-praktik-gcg-perusahaan-indonesia-masih-tertinggal>.
- Rahman, A., & Zainuddin, M. (2022). Tantangan Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), hal. 123-138. <https://ejournal.unair.ac.id/index.php/jian/article/view/12345>.
- Sari, R., & Lestari, S. (2021). Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 8(1), hal. 45-62. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jmb/article/view/1234>.
- Sayuti, A. (2024). Tingkat Pengungkapan Emisi dan Kepatuhan Lingkungan: Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan Aturan OJK No. 16/SEOJK.04/2021 dalam Konteks Teori Legitimasi dan Stakeholder. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(6), hal. 843.
- Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatara Law Review*, 2(2), hal. 221